

ABSTRAK

Dalam melahirkan tata kelola pemerintahan di Indonesia masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi dalam mengelola daerahnya masing-masing. Menurut Hariyanto (2005) kebijakan desentralisasi menjadi pilihan baik di negara maju maupun negara berkembang dalam menjalankan kebijakan ekonominya tidak terkecuali di Indonesia. Menurut Halim dalam Rahmawati (2010) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DBH, DAU dan DAK) dan pinjaman daerah, dekonsentrasi. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh pemerintah daerah melalui APBD, sedangkan yang lain dikelola oleh pemerintah pusat melalui kerjasama dengan pemerintah daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Pengeluaran Daerah (1) adalah uang yang keluar dari kas daerah (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara). Pengeluaran Daerah (2) adalah uang yang keluar dari kas daerah (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan). Di Daerah Istimewa Yogyakarta, pengeluaran pemerintah daerah setiap tahunnya semakin meningkat.

Dalam penelitian ini, model pengeluaran pemerintah daerah DIY di estimasi dengan menggunakan OLS. Dengan periode pengamatan 16 tahun dari 1996-2011. Penelitian ini menggunakan beberapa pengujian, seperti uji t, uji F, uji asumsi klasik.

Hasil analisis dari penelitian ini, semua variabel independen (PDRB konstan perkapita, PAD dan dana perimbangan) berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran daerah DIY dan secara bersama-sama semua variabel berpengaruh signifikan.

kata kunci : *pengeluaran pemerintah daerah DIY, PAD, PDRB konstan perkapita, dana perimbangan.*

ABSTRACT

In the birth of governance in Indonesia people are expected to participate in managing their respective regions. According Hariyanto (2005) decentralization policy of choice in both the developed and developing countries in implementing economic policy in Indonesia is no exception. According halim in rahmawati (2010) in the framework of governance and service to the community berdsasarkan principle of decentralization, the area was given the authority to collect taxes / levies and manage natural resources. Sources of funding for the region consisting of the original income, Fund Balance (DBH, DAU and DAK) and lending areas, deconcentration. The first three sources directly managed by the local government through the budget, while others are managed by the central government through cooperation with local governments. Budget (budget) consists of three main components, namely the element of acceptance, routine expenditure and development expenditure. Local Expenditures (1) is the money that comes out of the treasury area (Article 1 Point 12 of Law No. 17 of 2003 on State Finances). Local Expenditures (2) is the money that comes out of the treasury area (Article 1 Point 12 of Law No. 33 of 2004 on Financial Balance). In Yogyakarta, local government spending each year is increasing.

In this study, a model of local government expenditure DIY estimated using OLS. With the 16-year observation period from 1996 to 2011. This study used several tests, such as t-test, F, classical assumption.

keywords: DIY local government expenditure, revenue, GDP per capita constant, the balance funds.